

Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Sarmi Menggunakan Pendekatan *Location Quotient* (LQ)

Charlota Stella Kakisina*

* Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 1 Juli 2026

Disetujui 31 Juli 2026

Keywords:

Location Quotient (LQ),
Sektor Basis,
Sektor Nonbasis,
Sektor Unggulan,
Produk Domestik Regional
Bruto,
Kabupaten Sarmi

ABSTRAK

Abstract : This research aims to analyze the potential of the economic sector in Sarmi Regency. The analysis was carried out on 17 economic sectors based on the 2010 Gross Regional Domestic Product (GDP) on the basis of Constant Prices (ADHK) in Sarmi Regency and Papua Province from 2021 to 2025 using the Location Quotient (LQ) method. The results of the study show that there are 8 base sectors with an $LQ > 1$ value, including: agriculture, forestry and fisheries categories; the categories of government, defense and compulsory social security administration; construction category; real estate categories; educational service categories; health services and social activities categories; transportation and warehousing categories and other service categories. The agriculture, forestry and fisheries categories are the base sector as well as the leading sector in Sarmi District with the highest LQ value of 2.4. Meanwhile, the categories classified as non-base sectors with an $LQ < 1$ value are: mining and quarrying category, processing industry category, electricity and gas procurement category, water procurement category, waste management, waste and recycling, large trade and retail category, accommodation and food and beverage provision, information and communication category, financial and insurance business sector category and corporate services category.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sektor ekonomi di Kabupaten Sarmi. Analisis dilakukan terhadap 17 sektor ekonomi berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Sarmi dan Provinsi Papua tahun 2021 sampai 2025 dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 sektor basis dengan nilai $LQ > 1$ antara lain : kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori konstruksi; kategori real estate; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial; kategori transportasi dan pergudangan dan kategori jasa lainnya. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis sekaligus sektor unggulan di Kabupaten Sarmi dengan nilai LQ tertinggi sebesar 2,4. Sedangkan kategori yang tergolong dalam sektor non basis dengan nilai $LQ < 1$ yaitu: kategori pertambangan dan penggalian, kategori industri pengolahan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi dan kategori jasa perusahaan.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Charlota Stella Kakisina,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : stella25181@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah pada era otonomi menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai

dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Perbedaan karakteristik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta struktur ekonomi menyebabkan setiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda sehingga strategi pembangunan tidak dapat disamaratakan. Identifikasi sektor basis menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi daerah.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Sjafrizal, 2008). Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan Indonesia melalui Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 bertujuan memberikan hak untuk pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan dalam pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan, (Arsyad, 2010).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah. PDRB digunakan untuk mengetahui apakah perekonomian suatu daerah mengalami pertumbuhan atau penurunan. PDRB menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, mengalokasikan anggaran juga mengevaluasi kebijakan pembangunan. Provinsi Papua terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1(satu) Kota sejak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) pada tahun 2022.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Jayapura	2,25	3,58	1,49	2,81	2,68
Kepulauan Yapen	2,34	3,40	1,14	2,27	2,46
Biak Numfor	1,53	3,53	1,96	1,04	2,07
Sarmi	0,12	1,80	2,57	3,27	2,51
Keerom	1,63	1,79	0,92	2,11	2,32
Waropen	-0,52	3,31	-2,33	1,61	2,45
Supiori	-0,47	0,53	-0,40	1,07	2,02
Mamberamo Raya	-0,76	0,97	0,94	1,97	1,68
Kota Jayapura	1,67	2,34	3,05	2,15	3,02
Jumlah Kabupaten/Kota	1,64	2,67	2,10	2,20	2,71

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2026

Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sepanjang tahun 2021-2025 rata-rata mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, pertumbuhan PDRB hampir semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan yang disebabkan adanya pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Sebelum pembentukan daerah otonomi baru, Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/kota namun setelah dibentuk tiga Provinsi daerah otonomi baru, Provinsi Papua menjadi 9 kabupaten/kota. Kabupaten Sarmi adalah salah satu kabupaten yang tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarmi mengalami kenaikan selama tahun 2021-2024, namun pada tahun 2025 pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarmi mengalami penurunan sebesar 0,76%. Fenomena ini menarik bagi peneliti untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis di Kabupaten Sarmi sehingga kebijakan prioritas sektoral menjadi tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (2010) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Arsyad juga mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Sementara itu, Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, tujuan tersebut dicapai melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi unggulan sehingga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sedangkan menurut Sjafrizal (2008), pembangunan ekonomi daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan ekonomi daerah menekankan pemanfaatan potensi lokal dan keunggulan komparatif setiap daerah agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sjafrizal menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga pada perubahan struktur ekonomi menuju kondisi yang lebih produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan hasil pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap daerah perlu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah. Sjafrizal juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1) potensi sumber daya alam, yang menjadi modal dasar bagi kegiatan ekonomi daerah (2) kualitas sumber daya manusia, yang menentukan produktivitas dan daya saing. (3) ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi yang mendukung aktivitas ekonomi. (4) investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (5) Kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. dan (6) Kemajuan teknologi dan inovasi, yang meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing daerah.

Sektor Basis dan Non-Basis

Teori basis ekonomi merupakan faktor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan terkait langsung dengan hal permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ekonomi pada prinsipnya membedakan kegiatan sektor basis dan kegiatan sektor non-basis. Aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh suatu daerah, sedangkan aktivitas sektor non basis merupakan sektor sekunder yang artinya tergantung pada perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh (Arsyad, 1999).

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian memproyeksikan aktivitas tersebut dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh atau tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah tersebut terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar (Arsyad, 1999)

Location Quotient

Location Quotient (LQ) adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis di suatu wilayah dengan membandingkan kontribusi sektor tertentu terhadap PDRB daerah dengan kontribusi sektor yang sama pada PDRB wilayah acuan, seperti tingkat nasional. LQ dapat menunjukkan tingkat spesialisasi ekonomi daerah terhadap sektor tertentu dan digunakan untuk menetapkan sektor unggulan yang layak dijadikan prioritas pembangunan (Saragi dkk, 2025).

Teknik LQ belum dapat menentukan kesimpulan akhir dari sektor yang diidentifikasi sebagai sektor strategis namun sudah cukup untuk memberikan gambaran akan kemampuan sektor yang diidentifikasi tersebut. Kemampuan sektor dari suatu wilayah dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut (Daryanto dan Hafizrianda, 2010):

Pendekatan Tenaga Kerja:

$$LQ = \frac{Li/Lt}{Ni/Nt}$$

Keterangan

LQ : *Location Quotient*

Li : Jumlah tenaga kerja sektor i pada wilayah yang lebih kecil

Lt : Jumlah tenaga kerja keseluruhan pada wilayah lebih kecil

Ni : Jumlah tenaga kerja sektor i pada wilayah yang lebih besar

Nt : Jumlah tenaga kerja keseluruhan pada wilayah lebih besar

Pendekatan Pendapatan:

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Keterangan :

LQ : Location Quotient

Vi : Nilai PDRB sektor i pada wilayah yang lebih kecil

Vt : Nilai PDRB keseluruhan pada wilayah lebih kecil

Yi : Nilai PDRB sektor i pada wilayah yang lebih besar

Yt : Nilai PDRB keseluruhan pada wilayah lebih besar

Jika hasil perhitungan menghasilkan :

1. $LQ > 1$, sektor tersebut merupakan sektor basis dan menjadi sumber pertumbuhan daerah tersebut, hasil dari sektor tersebut dimanfaatkan untuk dalam daerah dan diekspor ke luar daerah.
2. $LQ = 1$, tergolong non basis, sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kontribusi. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah saja.
3. $LQ < 1$, tergolong sebagai sektor non basis. Sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sehingga memerlukan impor dari luar daerah.

Terdapat kelebihan serta kekurangan pada metode LQ. Kelebihan metode LQ adalah penerapannya yang sederhana, mudah, dan program pengolahan data yang rumit tidak diperlukan. Sedangkan untuk kekurangannya, metode LQ membutuhkan keakurasian data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Sarimi menggunakan pendekatan analisis *Location Quotient* (LQ). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini melibatkan perhitungan angka rasio untuk mengukur keunggulan relatif suatu sektor terhadap PDRB daerah. Sedangkan sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemetaan terhadap sektor-sektor ekonomi yang tergolong basis (unggulan) dan non-basis berdasarkan data statistik sektoral.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi publikasi statistik secara digital (*website*) Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarimi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Data yang dikumpulkan meliputi nilai PDRB sektoral dan total dari Kabupaten Sarimi dan Provinsi Papua periode tahun 2021-2025. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui perbandingan proporsi kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total PDRB Kabupaten Sarimi dengan proporsi yang sama pada tingkat Provinsi Papua. Rumus LQ yang digunakan adalah sebagai berikut (Daryanto dan Hafizrianda, 2010) :

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Keterangan :

LQ : Location Quotient

Vi : Nilai PDRB sektor i pada Kabupaten Sarimi

Vt : Nilai PDRB keseluruhan pada Kabupaten Sarimi

Yi : Nilai PDRB sektor i pada Provinsi Papua

Yt : Nilai PDRB keseluruhan pada Provinsi Papua

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kabupaten Sarimi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (juta rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	562.263,10	562.343,39	574.819,92	569.533,58	594.236,87
B	Pertambangan dan Penggalian	26.989,66	27.484,50	29.198,13	29.300,55	30.254,05
C	Industri Pengolahan	39.394,26	40.108,96	41.023,90	41.567,95	42.628,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	757,97	795,69	870,64	895,88	956,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.210,67	1.243,80	1.283,48	1.334,22	1.336,86
F	Konstruksi	361.118,56	375.021,62	386.683,86	408.364,37	410.184,11
G	Perdagangan Besar dan	188.744,62	201.345,45	214.826,22	228.117,97	239.498,33

	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	88.945,68	104.937,02	111.817,24	118.514,68	114.933,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.898,36	13.707,10	14.919,94	15.874,35	16.527,87
J	Informasi dan Komunikasi	64.178,78	67.657,85	68.239,39	73.968,97	78.027,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21.405,06	21.880,91	22.101,09	23.356,24	23.499,10
L	Real Estate	60.974,65	63.864,46	68.487,57	73.860,13	78.431,91
M,N	Jasa Perusahaan	11.610,65	12.124,93	12.392,02	12.783,43	12.955,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	268.916,64	265.894,76	274.650,96	298.364,24	319.588,67
P	Jasa Pendidikan	63.791,65	66.224,98	68.343,07	72.134,83	74.521,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48.590,06	49.375,15	50.813,88	54.311,56	56.118,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	31.172,10	32.535,66	33.899,03	36.219,43	35.298,40
	Produk Domestik Regional Bruto	1.852.962,48	1.906.546,24	1.974.370,35	2.058.502,39	2.128.996,62

Sumber : BPS Kabupaten Sarmi, 2026

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021-2025 (miliar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.755,83	17.135,86	7.017,87	7.073,68	7.401,06
B	Pertambangan dan Penggalian	63.915,45	74.220,08	451,68	473,46	491,66
C	Industri Pengolahan	2.853,50	2.855,82	1.417,98	1.492,64	1.547,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	58,12	62,05	33,83	36,79	38,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	81,79	86,58	61,08	62,88	64,92
F	Konstruksi	19.325,89	20.148,25	8.983,49	9.153,45	9.104,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.888,81	14.553,06	7.769,26	8.228,66	8.583,13
H	Transportasi dan Pergudangan	5.090,76	5.953,66	3.237,90	3.455,92	3.543,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	938,47	976,45	592,05	618,52	634,73
J	Informasi dan Komunikasi	6.295,32	6.639,24	3.724,89	3.953,76	4.177,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.293,48	2.409,12	1.733,02	1.777,30	1.778,72
L	Real Estate	4.247,22	4.449,45	2.600,14	2.716,48	2.888,98
M,N	Jasa Perusahaan	1.778,50	1.844,32	1.274,86	1.314,17	1.365,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.561,13	13.876,90	6.239,86	6.689,04	7.243,21
P	Jasa Pendidikan	3.222,26	3.273,86	1.812,12	1.868,33	1.972,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.619,67	2.620,86	1.502,43	1.554,41	1.634,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.748,97	1.801,71	1.097,38	1.117,69	1.165,09
	Produk Domestik Regional Bruto	158.675,15	172.907,29	49.549,83	51.587,16	53.634,65

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2026

Tabel 4. Nilai Location Quotient Kabupaten Sarmi

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	2,98	2,06	2,02	2,02	2,4	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,03	1,62	1,55	1,55	0,96	Non Basis
C	Industri Pengolahan	1,18	1,27	0,73	0,70	0,69	0,91	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	1,16	0,65	0,61	0,63	0,83	Non Basis

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,27	1,30	0,53	0,53	0,52	0,83	Non Basis
F	Konstruksi	1,60	1,69	1,08	1,12	1,14	1,32	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,16	1,25	0,69	0,69	0,70	0,90	Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	1,50	1,60	0,87	0,86	0,82	1,13	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,27	0,63	0,64	0,66	0,88	Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,87	0,92	0,46	0,47	0,47	0,64	Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,80	0,82	0,32	0,33	0,33	0,52	Non Basis
L	Real Estate	1,23	1,25	1,30	1,34	1,38	1,30	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,56	0,60	0,24	0,24	0,24	0,38	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,74	1,10	1,12	1,11	1,35	Basis
P	Jasa Pendidikan	1,70	1,83	0,95	0,97	0,95	1,28	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,71	0,85	0,88	0,87	1,18	Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,64	0,78	0,81	0,76	1,10	Basis

Sumber : Data Diolah, 2026

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Sarmi pada tahun 2021 sampai 2025 dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat 8 (delapan) kategori lapangan usaha yang tergolong sektor basis dan 9 (sembilan) kategori lapangan usaha yang tergolong sektor non basis. Kategori lapangan usaha yang tergolong sektor basis dengan nilai LQ > 1 adalah sebagai berikut : kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ sebesar 2,4; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai LQ sebesar 1,35; kategori konstruksi dengan nilai LQ sebesar 1,32; kategori real estate dengan nilai LQ sebesar 1,30; kategori jasa pendidikan dengan nilai LQ sebesar 1,28; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai LQ sebesar 1,18; kategori transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ sebesar 1,13; dan kategori jasa lainnya dengan nilai LQ sebesar 1,10. Hasil temuan ini berarti bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarmi karena produk dan jasa dari sektor basis dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Sarmi sendiri juga diekspor ke luar Kabupaten Sarmi.

Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis dengan nilai LQ tertinggi sebesar 2,4. Kategori ini memiliki kontribusi yang paling besar dalam PDRB Kabupaten Sarmi selama tahun 2021-2025. Kabupaten Sarmi menghasilkan komoditas tanaman hortikultura antara lain : cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, kentang, kubis, tomat, bayam dan terung. Komoditas tanaman perkebunan yaitu tanaman kelapa, kakao, pinang, kopi dan cengkeh. Komoditas kelapa telah lama menjadi primadona di Kabupaten Sarmi. Sedangkan komoditas peternakan antara lain populasi ternak sapi potong, kuda, kambing dan babi. Populasi unggas antara lain: ayam kampung, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging.

Sedangkan 9 (sembilan) kategori lapangan usaha lainnya memiliki nilai LQ < 1 yang tergolong sektor non basis antara lain: kategori pertambangan dan penggalian, kategori industri pengolahan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi dan kategori jasa perusahaan. Artinya bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Sarmi sehingga memerlukan impor dari luar wilayah Kabupaten Sarmi.

KESIMPULAN

Kategori lapangan usaha yang tergolong sektor basis di Kabupaten Sarmi antara lain : kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori konstruksi; kategori real estate; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial; kategori transportasi dan pergudangan dan kategori jasa lainnya. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis sekaligus sektor unggulan di Kabupaten Sarmi. Sedangkan kategori yang tergolong dalam sektor non basis yaitu: kategori pertambangan dan penggalian, kategori industri pengolahan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi dan kategori jasa perusahaan

SARAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi perlu memprioritaskan perencanaan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor basis melalui peningkatan investasi; penyediaan sarana dan prasarana produksi; peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu meningkatkan produktivitas. Selain itu Pemkab Sarmi juga perlu mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan; menjalin kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan dan masyarakat. Pemkab Sarmi juga berperan dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi untuk sektor-sektor non basis sehingga berpotensi menjadi sektor basis dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencana dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE
- Arsyad, Lincoln, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi, 2025. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sarmi Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Sarmi: BPS Kabupaten Sarmi
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi, 2025. Kabupaten Sarmi Dalam Angka, Sarmi : BPS Kabupaten Sarmi
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2026. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha 2021-2025, Jayapura: BPS Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2026. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha 2021-2025, Jayapura: BPS Provinsi Papua
- Daryanto, A dan Hafizrianda, Y, 2010. *Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Bogor: IPB Press
- Pratiwi, R., Afrizal, R., Ruspianda, R., Yuliana, D. 2024. *Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Kuantan Singingi*, Selodang Mayang Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Volume 10 Nomor 2, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2>
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*, Padang: Baduose Media
- Saragi, J., Sianturi, Y., Yusuf, M., Zai, B., Silalahi, N., Malau, C., Sibarani, A. 2025. *Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Karo Menggunakan Pendekatan Location Quotient (LQ)*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 7 Nomor 3, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, <https://10.36985/g60syh89>
- Todaro, M.P., Smith, C, S, 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*, Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Lembar Negara RI Tahun 2004. Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta